

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

**Ilham Ahmad Maulana**

Maulahmad705@gmal.com  
Universitas Islam Batik Surakarta

**Endang Masitoh**

Universitas Islam Batik Surakarta

**Riana R Dewi**

Universitas Islam Batik Surakarta

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out and analyze the influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Over Time Budget Financing (SILPA) and area size on capital expenditure on district / city governments in Central Java for the period of 2016-2018.*

*This research method is quantitative. The population of this research is 35 regencies / cities in Central Java. The sampling method used is saturated sampling so the sample in this study is all members of the population. Data analysis in this study uses multiple linear regression analysis.*

*The results of this study indicate that the Regional Original Revenue (PAD), the Remaining Budget Financing (SILPA) and the size of the area affect the capital expenditure. While the General Allocation Fund (DAU) has no effect on capital expenditure.*

*Keywords : Factors; Capital Expenditure; General Allocation Fund*

### **PENDAHULUAN**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kuantitas pelayanan publik (Andirfa, 2009).

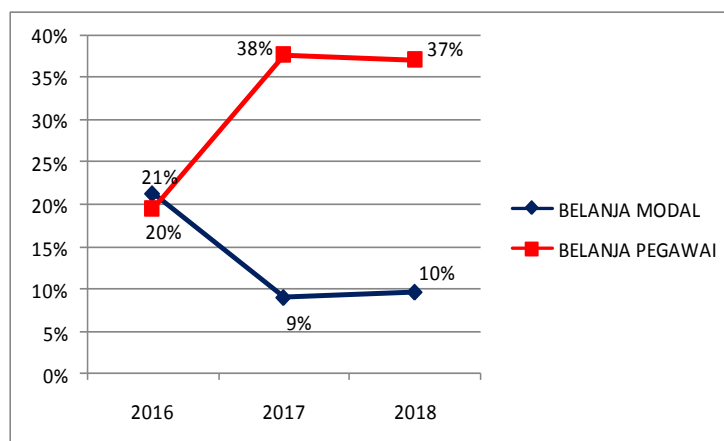
Salah satu bentuk otonomi daerah adalah dalam hal pengelolaan anggaran belanja daerah.. Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (expense) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, sedangkan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang

digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk aset tetap, yaitu peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta dalam tetap lainnya (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk aset tetap, yaitu peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta dalam tetap lainnya (Kusnandar dan Siswanto, 2012).



**Gambar 1.1**  
**Rekapitulasi Persentase Kenaikan dan Penurunan Belanja Pegawai, Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa ada penurunan belanja modal pada tahun 2016 dengan persentase 21% turun menjadi 9% pada tahun 2017 dan terdapat kenaikan pada belanja pegawai pada tahun 2016 dengan persentase 20% menjadi 38% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa APBD yang terealisasi pada 2017 tidak dialokasikan untuk kegiatan yang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto & Sari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan luas wilayah terhadap belanja modal. Manfaat diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan (Anthony & Govindarajan, 2011). Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara principal dan agen. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Agen diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan prinsipal. Prinsipal memiliki wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi prinsipal maka akan timbul masalah keagenan.

### Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah pada kegiatan khusus yang dipergunakan memaksimalkan pelayanan dan fasilitas masyarakat dalam jangka waktu panjang adalah belanja modal (Ayinde et al, 2015).

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri (Karyadi, 2017).

$$\text{PAD} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{lain lain pendapatan daerah yang sah.}$$

### Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*)

suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) (Wibisono & Wildaniati, 2016).

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

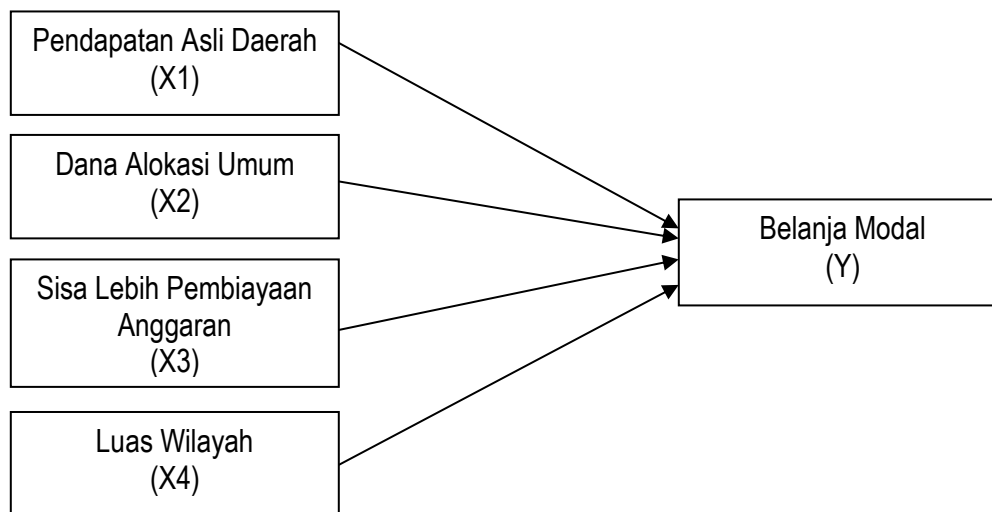
### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa SILPA adalah selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan (Rohini, 2019).

$$SILPA = \text{Surplus/Defisit Realisasi Anggaran} + \text{Pembiayaan Neto}$$

### **Luas Wilayah**

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan erupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintah, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah (Afkarina, 2017). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan yang menyediakan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar ukuran luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemeritah daerah agar tersedianya pelayanan publik efektif (Rohini, 2019). Luas wilayah daerah dapat diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut dengan satuan Km<sup>2</sup> (Sholikhah & Wahyudin, 2014).

**Kerangka Pemikiran****Gambar 1.2 kerangka Pemikiran****Hipotesis****Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.**

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sari & Robiyanto (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.**

Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui belanja modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah (Juniawan & Suryantini, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Widiasih & Gayatri (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan indikator efisiensi karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi. SILPA dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. Sehingga SILPA berpengaruh terhadap belanja modal (Kusumawardani, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Kosim (2017) menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Kusumawardani (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.**

Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Semakin besar luas suatu wilayah maka alokasi dana belanja modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana akan semakin besar pula. Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Putra (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Luas Wilayah Berpengaruh terhadap Belanja Modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasil penyajiannya berbentuk angka-angka dan datanya diolah dengan

menggunakan teknik statistik. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2012).

### **Populasi**

Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

### **Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen Laporan Realisasi APBD pada pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2016-2018. Data informasi variabel belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran diperoleh dari situs website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Sedangkan data informasi variabel luas wilayah dari situs website Badan Pusat Statistik diperoleh ([www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)).

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan data dari laporan-laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Instrumen penelitian ini berupa dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan laporan luas wilayah kabupaten/kota Di Jawa Tengah 2016-2018.

### **Teknis Analisis**

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 22. Tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data pada penelitian ini sebanyak 105 yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dan data luas wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2018. Setelah dilakukan seleksi data, diketahui terdapat *outliers* pada data penelitian. Data outliers adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data lainnya dalam satu rangkaian data.



**Tabel 1.1**  
**Prosedur Penentuan Data**

Prosedur penentuan data	Jumlah
1. Laporan realisasi APBD & data luas wilayah 2016-2018	105
2. Data <i>outliers</i>	(3)
<b>Total data yang digunakan</b>	<b>102</b>

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1.2 Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	102	129830,00	843986,00	379645,9706	134794,0345
PAD	102	171278,00	648327,00	328967,4902	99724,85882
DAU	102	440041,00	1373972,00	949488,1765	237397,0932
SILPA	102	34401,00	567717,00	201364,4216	120719,7108
LW	102	16,06	2013,86	896,9374	513,97810
Valid N (listwise)	102				

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah observasi dalam penelitian ini (N) sebanyak 102 , variabel belanja modal memiliki rata-rata sebesar 379645,97. Nilai belanja modal tertinggi sebesar 843986, sedangkan nilai belanja modal terendah sebesar 129830. Nilai standar deviasi belanja modal adalah 134794,03. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar 328967,49. Nilai pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar 648327, sedangkan nilai pendapatan asli daerah (PAD) terendah sebesar 171278. Nilai standar deviasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah 99724,85. Variabel dana alokasi umum (DAU) memiliki rata-rata sebesar 949488,17. Nilai dana alokasi umum (DAU) tertinggi sebesar 1373972, sedangkan nilai dana alokasi umum (DAU) terendah sebesar 440041. Nilai standar deviasi dana alokasi umum (DAU) adalah 237397,09. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) memiliki rata-rata sebesar 201364,42. Nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tertinggi sebesar 567717, sedangkan nilai dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terendah sebesar 34401. Nilai standar deviasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah 120719,71. Variabel luas wilayah (LW) memiliki rata-rata sebesar 896,93. Nilai luas wilayah (LW) tertinggi sebesar 2013,86 sedangkan nilai luas wilayah (LW) terendah sebesar 16,06. Nilai standar deviasi luas wilayah (LW) adalah 513,97.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikoleniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik merupakan syarat sebelum dilakukan pengujian regresi.

#### Uji Normalitas.

Untuk mengetahui normalitas data dapat dilihat dari *kolmogorov-smirnov* jika nilai signifikansi diatas 0,05 maka data penelitian mengasumsikan terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	101179,87934407
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,040
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,136 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Berdasarkan hasil tabel 1.3 pengujian data normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), diketahui Asymp.Sig (2-tailed) menunjukkan nilai 0,136, dimana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini uji multikoleniaritas dilakukan dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Jika

nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoleniaritas.

**Tabel 1.4. Hasil Uji Multikoleniaritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	30558,148	54933,553		,556	,579			
	PAD	,461	,105	,341	4,379	,000	,957	1,045	
	DAU	,048	,047	,084	1,015	,313	,839	1,192	
	SILPA	,335	,086	,300	3,890	,000	,975	1,026	
	LW	94,067	21,991	,359	4,278	,000	,826	1,210	

a. Dependent Variable: BM

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas pada tabel 1.4 diketahui bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas pada variabel dalam penelitian.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode korelasi *Spearman's Rho*.

**Tabel 1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			PAD	DAU	SILPA	LW	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1,000	,060	,117	,166	-,003
		Sig. (2-tailed)	.	,552	,243	,096	,975
		N	102	102	102	102	102
	DAU	Correlation Coefficient	,060	1,000	-,121	,263**	,050
		Sig. (2-tailed)	,552	.	,228	,008	,615
		N	102	102	102	102	102

SILPA	Correlation Coefficient	,117	-,121	1,000	-,042	-,108
	Sig. (2-tailed)	,243	,228	.	,674	,279
	N	102	102	102	102	102
LW	Correlation Coefficient	,166	,263**	-,042	1,000	,034
	Sig. (2-tailed)	,096	,008	,674	.	,732
	N	102	102	102	102	102
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,003	,050	-,108	,034	1,000
	Sig. (2-tailed)	,975	,615	,279	,732	.
	N	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 1.5 diketahui nilai Sig.(2-tailed) masing-masing variabel lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelum (t- 1) (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson (DW test)*.

**Tabel 1.6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,661 <sup>a</sup>	,437	,413	103244,98772	2,085

a. Predictors: (Constant), LW, SILPA, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Tabel 1.6 dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah data (n) 102 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,7596 dan batas bawah (dL) 1,5969. Karena nilai DW 2,085 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7596 dan kurang dari 4-1,7596 (4-dU) (1,7596 < 2,085 < 2,2404) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

## Uji Regresi Linear Berganda.

Tabel 1.7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30558,148	54933,553		,556	,579
	PAD	,461	,105	,341	4,379	,000
	DAU	,048	,047	,084	1,015	,313
	SILPA	,335	,086	,300	3,890	,000
	LW	94,067	21,991	,359	4,278	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Berdasarkan hasil pengujian data, dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = 30558,148 + 0,461 \text{ PAD} + 0,048 \text{ DAU} + 0,335 \text{ SILPA} + 94,067 \text{ LW} + e$$

Nilai konstanta untuk variabel belanja modal sebesar 30558,148 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata belanja modal sama dengan 30558,148.

Koefisien regresi untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,461 artinya setiap kenaikan Rp. 1 pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,461. Koefisien regresi untuk variabel dana alokasi umum sebesar 0,048 artinya setiap kenaikan Rp. 1 dana alokasi umum akan menaikkan belanja modal sebesar 0,048. Koefisien regresi untuk variabel sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 0,335 artinya setiap kenaikan Rp. 1 sisa lebih pembiayaan anggaran akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,335. Koefisien regresi untuk variabel luas wilayah sebesar 94,067 artinya setiap kenaikan 1 Km<sup>2</sup> luas wilayah akan meningkatkan belanja modal sebesar 94,067.

**Uji t.**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen atau secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2016- 2018. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 1.8. Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30558,148	54933,553		,556	,579
	PAD	,461	,105	,341	4,379	,000
	DAU	,048	,047	,084	1,015	,313
	SILPA	,335	,086	,300	3,890	,000
	LW	94,067	21,991	,359	4,278	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X1) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 4,379. Ternyata  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $4,379 > 1,985$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) diterima atau dengan kata lain variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (X2) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1,015. Ternyata  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $1,015 < 1,985$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,313 yang artinya lebih besar dari 0,05 ( $0,313 > 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) ditolak atau dengan kata lain variabel dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (X3) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3,890. Ternyata  $t_{hitung}$  lebih besar daripada tabel ( $3,890 > 1,985$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3) diterima atau dengan kata lain variabel sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa luas wilayah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 4,278. Ternyata  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $4,278 > 1,985$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) diterima atau dengan kata lain variabel luas wilayah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

**Uji F**

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (*fit*) atau tidak. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  maka hipotesis diterima, yang berarti secara simultan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 1.9. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	801138439202,719	4	200284609800,680	18,789	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1033974166392,193	97	10659527488,579		
	Total	1835112605594,912	101			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), LW, SILPA, PAD, DAU

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $18,789 > 2,465$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

**Uji Koefisien Determinasi**

Tujuan pengujian koefisien determinasi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yang dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R square* mendekati satu, maka variabel independen mampu memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel independen.

**Tabel 1.1.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 <sup>a</sup>	,437	,413	103244,98772

a. Predictors: (Constant), LW, SILPA, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square 0,413 (41%). Berdasarkan pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa model penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 41% sedangkan sisanya sebesar 59% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pengujian hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, maka  $H_1$  diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi maupun rendah pendapatan asli daerah akan memengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2016), Saputro (2016), Kosim (2017), Widiasih & Gayatri (2017), Sari & Robiyanto (2017), Ernayani (2017) dan Venkataraman & Urmi (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pengujian hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, maka  $H_2$  ditolak. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam prakteknya dimanfaatkan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan. Sedangkan fungsi adanya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016), Sari & Robiyanto (2017) dan Ayem & Pratama (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian



yang dilakukan oleh Napitu *et al* (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pengujian hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal, maka  $H_3$  diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi maupun rendah SILPA akan mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah. SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Besarnya porsi SILPA dalam struktur penerimaan pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016), Kosim (2017), Putra (2017) dan Kusumawardani (2018) menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitu *et al* (2018) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pengujian hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal, maka  $H_4$  diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin luas maupun sempit suatu wilayah akan mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016) dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2016) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### Saran

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian ini terbatas pada data penelitian kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga tidak bisa digeneralisir untuk kabupaten/kota pada provinsi lain di Indonesia. (2) Penelitian ini hanya terbatas menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah. Penelitian selanjutnya diharapkan (1) Karena penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten/kota di Jawa Tengah saja dan tidak bisa digeneralisasikan pada kabupaten/kota di provinsi lain, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas penelitian dengan menambah lokasi di provinsi lain. (2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel yang bisa mempengaruhi belanja modal seperti pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, Z., & Hermanto., S. B. (2017i). Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2012-2015.
- Andirfa, M. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Anthony, N. R., & Govindarajan, V. (2011). Sistem Pengendalian Manajemen (Vol. 2). Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Ardhani. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewayogyakarta Periode 2011-2016 .
- Darwanto, & Sari, Y. Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah (Vol. 3). Jakarta: Erlangga.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali.
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. Yogyakarta.
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Kusumawardani, I. (2018). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Silpa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mulyani, H. (2016). *The Relationship Of Local Own Revenues And General Fund Allocation On Capital Expenditure Of Local Government*.
- Napitu, A. E., Dillak, V. J., & Kurnia. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal.
- Putra, F. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- Rohini, S. (2019). Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal .
- Saputro, E. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, P. P., & Robiyanto, F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Sholikhah, I., & Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa.
- Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .

Venkataraman, S., & Urmi, A. (2017). Development Expenditure, Fiscal Consolidation And Public Revenue In India.

Wibisono, N., & Wildaniati, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau, Silpa Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.